

24Jam

Soroti Dugaan Mega Korupsi Kota Bogor, GPI Akan Lakukan Demonstrasi di Bogor dan Jakarta

Suferi - JABAR.24JAM.CO.ID

Dec 2, 2022 - 22:54



GPI
KOTA BOGOR

LONG MARCH BOGOR - JAKARTA
GPI BERSAMA RAKYAT

SELASA S/D JUMAT
6 - 9 DESEMBER 2022



PUKUL. 09 : 00 - SELESAI

- USUT DANA BOS DI KOTA BOGOR
- USUT DUGAAN ALIRAN DANA HIBAH PEMKOT KE KEJARI,BAZNAS,DLL
- USUT DUGAAN KKN & MAFIA DI DINAS PUPR KOTA BOGOR
- USUT DUGAAN KKN DI DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
- SEGERA PERIKSA WALIKOTA BOGOR DUGAAN SKANDAL DANA APBD 2021-2022

TITIK AKSI !!!

BALAIKOTA BOGOR - KEJARI KOTA BOGOR - KEJAGUNG - KPK

Dok. Serusan Aksi GPI Kota Bogor

BOGOR- Gerakan Pemuda Islam Kota Bogor rencananya akan aksi besar-besaran dalam memperingati Hari Anti Korupsi pada tanggal 06-09 Desember 2022 mendatang.

Di Hari Anti Korupsi tersebut, GPI Kota Bogor menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran beberapa instansi di Kota Bogor. GPI menyebut, terdapat dugaan Mega Korupsi di Kota Bogor.

Dugaan Korupsi yang disoroti GPI Kota Bogor tersebut, yakni aliran dana BOS Dinas Pendidikan, aliran dana hibah Pemkot kepada Kejari, Baznas dll, dugaan KKN Dinas Kesehatan Kota Bogor, dugaan Skandal Wali Kota, DPRD, Kadin, terkait anggaran proyek tahun 2021-2022 dan dugaan KKN dan Fee Proyek Dinas PUPR.

" Dalam rangka memperingati hari anti korupsi, sekaligus wujud nyata dari reformasi 98, reformasi diseluruh aspek, termasuk diantaranya aspek hukum & birokrasi, makanya kami melihat ada yang perlu dibenahi oleh aparat hukum di Kota Bogor, khususnya kejaksaan" ungkap Bayu

"kejaksaan negeri kota bogor seakan tidak berkutik dan diam-diam dalam menegakan hukum di kota bogor, khususnya pemberantasan korupsi", sambung Ketua GPI Kota Bogor Bayu saat dihubungi Indonesiasatu.co.id (02/11/22).

Menurut Bayu, Penegakan hukum di kota bogor sangat lemah, adanya dugaan korupsi yang menyangkut beberapa Instansi termasuk Wali Kota dan DPRD sampai saat ini tidak ada tindakan dari pengak hukum.

" Kita lihat betapa lemahnya mereka dengan pemkot, sehingga kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum dipemkot yang muncul kepermukaan, seakan-akan mereka tutup mata, tutup telinga, atau sudah nyamankah dengan hibah dari pemkot ?", ungkap Bayu.

Kata Bayu, Pernyataan Wali Kota yang akan memblacklist perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, nyatanya sampai saat ini tidak dilakukan.

" Belum lagi dugaan skandal mafia proyek, dugaan pengkondisian proyek yang di mulai dari SKPD, terus masuk di DPRD dan disahkan dengan deal-dealan tertentu, seharusnya aparat hukum di Kota Bogor mencoba mengusut dugaan-dugaan permainan anggaran, ini sudah menjadi konsumsi publik yang harus diluruskan", tegasnya.

Dari hal tersebut diatas GPI selaku organisasi yang mengemban tugas sebagai kontrol sosial, akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta.

" Untuk itu saya pribadi selaku kontrol sosial dan sebagai ketua GPI Kota Bogor, akan melakukan aksi longmarch kejakarta, agar pusat melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bogor, demi majunya kota bogor dan lebih baik lagi", Pungkasnya. (feri)